KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

LP2KD TAHUN 2024

Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya seharihari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Penuntasan/penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan, semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat:

1. Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat,
2. Menciptakan berbagai kesempatan kerja,
3. Menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial
4. Mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, yang harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur, mulai dari pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa.

1.2 DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
c. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
e. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
f. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;

g. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.
a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penanggulangan Program Kemiskinan Daerah (LP2KD) dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemisikinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Masing-masing kegiatannya memiliki tujuan yang berbeda namun memiliki satu sasaran yang sama, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   Tujuan :

   a. Untuk pembangunan sarana dan prasarana dikelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
   b. Untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

   Tujuan :

   Pemberdayaan masyarakat dikelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dikelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Dari 2 kegiatan diatas, sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh Timur dalam penanggulangan kemisikinan, yaitu :

- Masyarakat di Kelurahan
- Lembaga kemasyarakatan kelurahan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II ANALISA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERANGKAT DAERAH

2.1 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
2.2 Strategi Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Penanggulangan Kemiskinan
2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Bab III CAPAIAN DAN ANALISIS KEMISKINAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR PADA TRIWULAN IV

2.4 Program Penanggulangan Kemiskinan
2.5 Capaian Kinerja Penangggulangan Kemiskinan

Bab IV MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
1.2 Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
1.3 Rencana Tindak Lanjut

Bab V PENUTUP

1.1 Kesimpulan
1.2 Rekomendasi

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISIKINAN

2.1 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemisikinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam mendorong pengentasan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Timur didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

MATRIKS PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2024

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	TARGET KEMISKINAN	PAGU DANA
1	**KEWILAYAHAN**	Masyarakat di Kelurahan Se Kecamatan Payakumbuh Timur		
	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2.345.787.700**
	Kegiatan : Pemberdayaan kelurahan			**2.345.787.700**
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan			1.276.303.600
	Sub Kegiatan : Pemberdyaan masyarakat di Kelurahan			1.069.484.100

Berikut Proporsi Anggaran Kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024, salah satu dari 5 (lima) Program yang dilaksanakan pada Kecamatan Payakumbuh Timur adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan baik di Tingkat Kecamatan maupun pada Tingkat Kelurahan, Total anggaran Perubahan pada Tahun 2024 yang disediakan pada program dimaksud berjumlah sebesar Rp. 2.556.829.750,- sedangkan alokasi dana yang disediakan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kelurahan sebesar Rp. 2.345.787.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 950.984.935,- Dengan capaian kinerja 41%, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024		Anggaran Tahun 2024 (DPA P)	Realisasi 2024	
							Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
	Kecamatan Payakumbuh Timur	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. IKM kelurahan**	91,00	1.800.000.000	2.345.787.700	-	950.921.635
						2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	1.800.000.000	2.345.787.700	-	950.921.635
					KegiatanPemberdayaankelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemerdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%	1.800.000.000	2.345.787.700	37%	950.921.635
					Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Jenis Sarana prasarana yang disediakan	1 Unit	775.931.600	1.276.303.600	1 Unit	454.063.300
					Pemberdyaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 Ormas	1.024.068.400	1.069.484.100	3 Ormas	496.984.935

Payakumbuh, Oktober 2024
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan, dari total pagu anggaran perubahan pada Tahun 2024 sebanyak Rp. 11.021.441.289, Kecamatan Payakumbuh Timur pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 2.556.829.750,- atau 23% dari total pagu anggaran pada Tahun 2024, dapat dilihat dari diagram berikut :

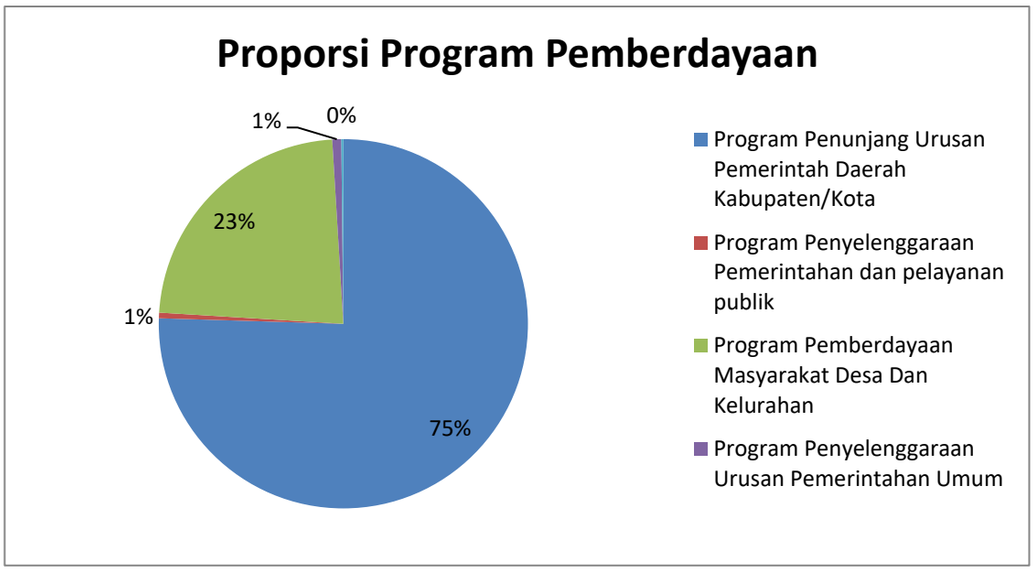

Dalam pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Payakumbuh Timur mengakomodir 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan memiliki 2 (dua) sub kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan total pagu anggaran pada Tahun 2024 sebanyak Rp. 2.556.829.750,- dan mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebanyak Rp. 2.345.787.700,- atau 48%, dapat dilihat dari diagram berikut :

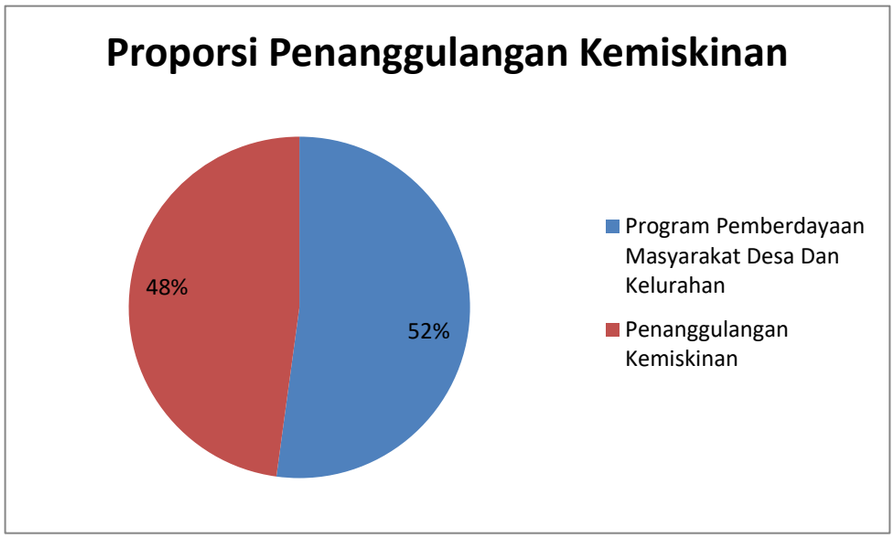

2.2 Strategi Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur terdapat pada 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   Kegiatan ini berupa pemenuhan fasilitas layanan kelurahan bagi masyarakat sebagai penunjang dalam berkegiatan. Dengan adanya dukungan fasilitas yang lengkap maka tujuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini berupa Pembinaan dan Pelatihan bagi masyarakat yang melibatkan lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, kemandirian serta pemahaman untuk dapat keluar dari ruang kemiskinan.

2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemerintah daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya dipandang penting untuk menggali dan mengkaji setiap potensi yang dimilikinya. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintahan, sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan agar terpenuhinya kebutuhan dalam penanganan pengaduan masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Timur telah memfasilitasinya dengan membentuk standar pelayanan bagi masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, adapun mekanisme layanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. Masyarakat menyampaikan pengaduannya secara lisan dan tertulis kepada tim pengaduan
2. Petugas kemudian menerima dan mencatat pengaduan
3. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya
4. Pengaduan di distribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut
5. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat
6. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut

Disamping itu Kecamatan Payakumbuh Timur juga sudah menyiapkan layanan lain agar mempermudah penyampaian pengaduan masyarakat dengan media sebagai berikut :

1. PATEN Kecamatan Payakumbuh Timur (melalui Survey dan Kotak Saran yang tersedia)
2. Facebook (Kecamatan Payakumbuh Timur),
3. Instagram : payakumbuh_timur
4. Youtube channel : @payakumbuhtimur4485
5. Website : https://kecpyktimur.payakumbuhkota.go.id

BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR PADA TRIWULAN IV

3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)* dari pemerintah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk Menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat *(people-centere development).* Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Capaian kinerja dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang di akomodir didalam kegiatan pemberdayaan kelurahan ada pada dua (2) sub kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilihat dari segi serapan anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 2.345.787.700,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 950.984.935,-** untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemisikinan Tahun 2024
Sumber Dana APBD Kota Payakumbuh, APBD Sumbar dan APBN

No.	Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target KK Miskin/Output Kegiatan	Lokasi	Sumber dan Besar Dana (Rp)			Realisasi								Total (tw, I,II,III,IV)	Keterangan (Belanja Langsung,Belanja Tidak)
					APBD Kota Payakumbuh	APBD Provinsi	APBN	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
								Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.		
1	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan																
	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
	Sub Kegiatan																
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur	1 unit	Kecamatan Payakumbuh Timur	1.276.303.600	-	-	1 unit	68.471.500	1 unit	276.442.800	1 unit	109.149.000	1 unit		454.063.300	(Belanja Tidak Langsung)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur	3 ormas	Kecamatan Payakumbuh Timur	1.069.484.100	-	-	3 ormas	20.307.000	3 ormas	129.650.225	3 ormas	346.964.410	3 ormas		496.921.635	(Belanja Tidak Langsung)
					2.345.787.700				88.778.500		406.093.025		456.113.410			950.984.935	

Payakumbuh, Oktober 2024
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

3.3 Gambaran Analisis Singkat Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)* dari pemerintah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk Menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat *(people-centere development).* Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan *(empowering)* masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan *(community worker)* dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui :

a. Pengembangan masyarakat, (masyarakat kelurahan)
b. Pengorganisasian masyarakat (kelembagaan masyarakat)

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat *home industry*; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding. Masih banyak bentuk lainnya yang bisa diupayakan. Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Timur Menyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan yang ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2024, adapun gambaran realisasi pelaksanaan masing- masing sub kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Berikut Laporan Realisasi Penanggulangan Kemikinan Kecamatan Payakumbuh Timur pada Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2024		PD Penanggung Jawab
												KINERJA	PAGU	
1	KEWILAYAHAN / Kecamatan Payakumbuh Timur	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM kelurahan 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan se Kecamatan payakumbuh Timur	1 Unit	519.975.510	Kecamatan Payakumbuh Timur
								Persentase Kegiatan Lingkup pemberdayaan Tingkat Kelurahan Yang difasilitasi	Pemberdyaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan se Kecamatan payakumbuh Timur	3 Ormas	1.280.024.490	Kecamatan Payakumbuh Timur

Payakumbuh, Oktober 2024
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Monitoring dan Evaluasi

Dalam meninjau keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan untuk dapat mengetahui target sasaran dan realisasi kegiatan serta kendala yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dari itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk melihat hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dilakukan evaluasi kegiatan secara berkala per triwulan dan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada kondisi saat ini dilihat dari segi serapan anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur masih belum memenuhi target yang ditetapkan dimana dari total anggaran **Rp. 2.345.787.700,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 950.984.935,-** atau **41%,** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu **2024**		**Realisasi 2024**	
			Kinerja	**Pagu**	**Kinerja**	**Pagu**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. IKM kelurahan**	91,00	1.800.000.000	-	950.984.935
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	1.800.000.000	-	950.984.935
	KegiatanPemberdayaankelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemerdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%	1.800.000.000	41%	950.984.935
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Jenis Sarana prasarana yang disediakan	1 Unit	1.276.303.600	1 Unit	454.063.300
	Pemberdyaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 Ormas	1.069.484.100	3 Ormas	496.921.635

4.2 Hambatan Dan tantangan

Adapun hambatan alam pelaksanaan kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Timur, antara lain :

Hambatan dan Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Lembaga kemasyarakatan yang kurang aktif yang berdampak sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.
4. Fasilitas yang belum memadai dan masih kurangnya potensi lokal
5. Anggaran yang terbatas, dimana alokasi anggaran saat ini belum mampu memenuhi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tepat

Adapun tantangan penanggulangan masyarakat, antara lain

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat
2. Kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya
3. Materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan
4. Metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
5. Waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluhan, pelatihan/kursus, demonstrasi/ praktek dll)
6. Bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dll) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
7. Fasilitas/bantuan-bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana/pemerintah.

   Dapat dilihat pada tabel berikut, rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Payakumbuh Timur ;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Menindaklanjuti Hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan antara lain :

1. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun sampai saat ini belum mampu memecahkan permasalahan kemiskinan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan masih minim, meskipun peluang yang ada cukup terbuka.
4. Komitmen Pemerintah dan kelembagaan masyarakat di kelurahan dalam program pengentasan kemiskinan belum optimal,

   Selain itu alokasi APBD untuk mendukung program itu juga sangat minim. Namun hal itu disebabkan faktor : rendahnya kemampuan keuangan Pemerintah Kelurahan, penanganan program penanggulangan kemiskinan masih terpusat dan masih minimnya komitmen Pemerintah kelurahan dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan TR III, terdapat beberapa rekomendasi Rencana Tindak lanjut yang perlu disikapi untuk meningkatkan kaulitas pelaksaan Program dan kegiatan di antaranya :

1. Pemerintah harus lebih melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan,
2. Perlunya pemberdayaan organisasi lokal di kelurahan dan diposisikan lebih baik,
3. Perlunya penguatan kemampuan keuangan kelurahan agar mampu mengatasi permasalahan yang belum tersentuh pemerintah,

4. Konsep pemberian bantuan kepada masyarakat kelurahan bisa mengacu pemberian DAU dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.
5. Perlunya menerapkan prinsip subsidiarity secara lebih arif, agar permasalahan yang bisa diselesaikan di bawah tidak perlu ditangani Pemerintah yang lebih atas.

   Terkait pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan maka Program/Kegiatan ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan proses proses perbaikan yang perlu dilaksanakan pada tahun berikutnya, serta memaksimalkan potensi / serta Sumber daya yang tersedia dalam pencapaian tujuan.

BAB III

PENUTUP

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam program-program yang menjadi program prioritas guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemisikinan di Kecamatan Payakumbuh Timur didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Demikian Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Timur kondisi 31 Oktober Tahun 2024 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya perbaikan dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan rencana kerja ini di masa yang akan datang.

Payakumbuh, Oktober 2024
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004